



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI

CAPAIAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS 2024-2026

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jakarta, 24 Juli 2026

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kebijakan Transportasi berpedoman pada **Perpres 173 Tahun 2024** tentang Kementerian Perhubungan dan **PM 4 Tahun 2025** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Tugas dan Fungsi

Tugas ► Menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi

Fungsi :

- 1 Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- 2 Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- 3 Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) di bidang transportasi;
- 4 Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
- 5 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
- 6 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- 7 Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi;
- 8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan BKT

Berpedoman pada **KM 41 Tahun 2023** Tentang Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Output dan Outcome

OUTPUT

Rekomendasi Kebijakan mencakup :

1. Naskah Akademik, Naskah Urgensi, Risalah Kebijakan (*Policy Brief*), Kertas Kerja Kebijakan (*Policy Paper*), Artikel Kebijakan, Telaahan Staf, Makalah Kebijakan.
2. Draft UU, PP, PM (Baru maupun amandemen).

OUTCOME

Kebijakan Regulasi Bidang Transportasi yang solutif, tepat sasaran, efektif dan efisien serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

HIGHLIGHT KEGIATAN STRATEGIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



KAJIAN STRATEGIS



1. *Cascading/Mandatory* RPJMN dan Asta Cita Presiden serta adopsi Isu Strategis Transportasi.
2. Mendukung Fokus utama Kemenhub Keselamatan & Keamanan, Pelayanan, Konektivitas & Aksesibilitas.
3. Mendukung penguatan Teknologi Informasi/Digitalisasi, Evaluasi Kelembagaan & Regulasi, Skema Pendanaan Kreatif, SDM Transportasi Kompetitif.



Kegiatan Rekomendasi Kebijakan



Rancangan/ Reviu Regulasi



Kajian Strategis

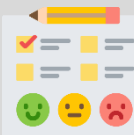
Teknologi, Logistik, Energi, Tarif angkutan, Lingkungan, Pendanaan, Kelembagaan, Keselamatan dan Keamanan, Inklusi (Gender, disabilitas dll), SDM, Mendukung Ketahanan Pangan

Melakukan monitoring dan evaluasi melalui hasil analisis MPD, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Survey Potensi Pergerakan pada masa Angleb dan Nataru

Pengadaan data **Mobile Positioning Data (MPD)** bertujuan mendapatkan data pergerakan orang dalam skala nasional untuk memprediksi pola pergerakan orang pada momen tertentu seperti Lebaran dan Natal & Tahun Baru



Cluster Tematik/Isu Strategis Sektor Transportasi



Monitoring & Evaluasi Angkutan Lebaran, Natal & Tahun Baru



Pengadaan Data MPD Asal Tujuan Pergerakan Orang



Seminar/ Expert talk/

Forum diskusi kepakaran membahas sejumlah isu strategis sektor transportasi



Agenda Setting

Dilaksanakan untuk **Identifikasi/ Penjaringan** isu sektor Transportasi serta **Pemetaan skala prioritas** terhadap isu/permasalahan kebijakan transportasi



Advokasi/ Sosialisasi/ Diseminasi

Dilaksanakan untuk **mendeliver regulasi/kebijakan sektor transportasi** ke stakeholder/ masyarakat umum.

HIGHLIGHT KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN (TAHUN 2024-2026)

RUMUSAN KEBIJAKAN



Bidang Sarana

- Kesiapan Sarana dan Navigasi Penerbangan serta Tanggung Jawab Asuransi dalam Pengoperasian PUTA untuk Komersial Penumpang dan Barang di Indonesia
- Penerapan Standar UN ECE Pada Bus
- Penggunaan Sarana Teknologi Pada Kendaraan Bermotor sebagai Alat Deteksi Dini Kesesuaian Muatan
- Layanan Water Taxi di Indonesia
- Kebijakan Peninjauan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
- Evaluasi Kebijakan Mendukung Percepatan Ekosistem Mobil Listrik



Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Perumusan Kebijakan Mengenai Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan pada Nataru Angleb 2025 Pada Pelabuhan Merak dan Bakauheni
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Transportasi Otonom di Indonesia;
- Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Slot Time Penerbangan di Indonesia
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pelayanan dan Tarif Ojek Online;
- Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan;
- Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api



Bidang Prasarana dan Integrasi Moda

- Pengoperasian Bandar Udara Perairan.
- Review Kebijakan Penyelenggaraan Bandar Udara Perairan.
- Skema Pembiayaan Pengoperasian Tol Laut Melalui Pendanaan Non APBN (New Concept Tol Laut).
- Peningkatan Kompetensi Situational Awareness dan Decision Making bagi Personel Air Traffic Controller (ATC).
- Optimalisasi Fungsi Terminal Penumpang untuk Mendukung Logistik.
- Kebijakan Optimalisasi Layanan Bandar Udara di Indonesia.
- Evaluasi kebijakan pelaksanaan KPBU sektor transportasi.
- PM 9 tahun 2025 kawasan tanpa rokok pada alat angkutan umum & prasarana transportasi



Bidang Keselamatan dan Keamanan

- Risk Journey Management
- Evaluasi Kebijakan Penanganan Masalah Over Dimension dan Over Load Pada Angkutan Jalan.
- Evaluasi Regulasi Perlintasan Sebidang (Reviu PM 94 tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan)
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kereta Feeder KA Cepat menjadi KA Komuter Bandung
- Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menjamin Keselamatan Berlalu Lintas
- Evaluasi Pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Non Konvensi

ANGLEB dan NATARU



Perumusan Kebijakan Pergerakan Masyarakat pada Masa Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

- Survei Prakiran Pergerakan Masyarakat
- Analisis Pergerakan Masyarakat menggunakan MPD
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Analisis dan Evaluasi



TOPIK ISU STRATEGIS TRANSPORTASI

KEGIATAN ANALISIS ISU STRATEGIS/DIREKTIF PIMPINAN

- ✓ Keselamatan dan Keamanan
- ✓ Teknologi
- ✓ Logistik
- ✓ Energi

- ✓ Tarif angkutan
- ✓ Inklusi (Gender, disabilitas dll)
- ✓ Sumber Daya Manusia

- ✓ Lingkungan
- ✓ Pendanaan
- ✓ Kelembagaan

CLUSTER TEMA ISU STRATEGIS BKT 2025-2029



MENDUKUNG RPJMN SERTA RENSTRA KEMENHUB 2025-2029



Efisiensi dan Konektivitas Logistik



**Angkutan Umum Massal dan
Transportasi Perkotaan**



**Transportasi di Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional**



Transportasi Kawasan 3TP



Transportasi Berkelanjutan



**Teknologi dan Digitalisasi
Transportasi**



**Pengembangan Sistem
Perencanaan Transportasi Nasional**



Resiliensi Transportasi Nasional



**Peningkatan Konektivitas Antar
Wilayah**



**Transportasi Inklusif dan
Berkeadilan**



**Peningkatan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi**



**Pembiayaan, Pendanaan dan
Investasi Transportasi**



**SDM, Kelembagaan dan
Kebijakan Transportasi**

Rekomendasi Kebijakan mencakup :

1. Naskah Akademik, Naskah Urgensi, Risalah Kebijakan (*Policy Brief*), Kertas Kerja Kebijakan (*Policy Paper*), Artikel Kebijakan, Telaahan Staf, Makalah Kebijakan.
2. Draft UU, PP, PM (Baru maupun amandemen).

MATRIKS KERANGKA REGULASI RENSTRA BKT 2025-2029

EKSTERNAL BKT

Untuk Mendukung regulasi Kemenhub

REKOMENDASI TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG TERKAIT SEKTOR TRANSPORTASI (3)

1. Rekomendasi Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang **LLAJ**
2. Rekomendasi Revisi UU No. 1 Tahun 2009 tentang **Penerbangan**
3. Rekomendasi Revisi UU No. 23 Tahun 2007 tentang **Perkeretaapian**
4. Rekomendasi UU **Sistranas**

REKOMENDASI PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT SEKTOR TRANSPORTASI (2)

1. PP tentang Penyelenggaraan **Seaplane** di Indonesia
2. PP tentang Pemberdayaan **Industri dan Pengembangan Teknologi** Transportasi di Indonesia

REKOMENDASI PERATURAN PRESIDEN SEKTOR TRANSPORTASI (6)

1. Perpres tentang Penyelenggaraan **Transportasi Otonom** di Indonesia
2. Perpres tentang Pembangunan **Infrastruktur Transportasi Nasional**
3. Perpres tentang **Transportasi Online**
4. Perubahan Perpres No 44/2018 tentang **Indonesia National Single Window**
5. Perpres tentang Penyelenggaraan **Urban Air Mobility dengan Teknologi Vertical Take Off and Landing** di Indonesia
6. Raperpres Penyelenggaraan **Hulu-Hilir Jalan Raya**

REKOMENDASI NASKAH URGENSI SEKTOR TRANSPORTASI (2)

1. Naskah Urgensi Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Menjamin Keselamatan Berjalan Lintas (PM 19/2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
2. Naskah Urgensi Sistralognas

REKOMENDASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN SEKTOR TRANSPORTASI (13)

1. PM tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Perumusan Kebijakan
2. PM tentang SOP Penyampaian Rekomendasi Kebijakan
3. PM tentang Standar Perlengkapan Jalan dan Tata Cara Berjalan Lintas pada Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api
4. PM tentang Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, serta Evaluasi Kebijakan di lingkungan Kemenhub
5. PM tentang Ortaker Kemenhub
6. PM tentang Rencana Induk Transportasi Logistik Nasional
7. PM tentang Rencana Aksi Keselamatan LLAJ
8. PM tentang Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian
9. PM Rencana Induk Transportasi Kawasan Aglomerasi di IKN
10. PM perubahan atas PM Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
11. PM Hibah Angkutan Pelayaran Rakyat
12. PM tentang Standarisasi Desain Sarana Prasarana Angkutan Massal Perkotaan yang Sosial Inklusif
13. PM tentang Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (PM 79/2017)

INTERNAL

Mendukung Tata Kelola BKT

REKOMENDASI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN SEKTOR TRANSPORTASI (2)

1. KM tentang Kompetensi Jabatan Perumus Kebijakan di lingkungan Kemenhub
2. KM tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan BKT
3. KM tentang Rencana Induk Kebijakan Transportasi

Kebutuhan penguatan regulasi atas rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi: 4 UU, 2 PP, 6 Perpres, 13 Permenhub, 2 Kepmenhub, dan 2 Naskah Urgensi

REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG SARANA TRANSPORTASI TAHUN 2024-2026

2024 (13 Rekomendasi Kebijakan)	2025 (9 Rekomendasi Kebijakan)	2026 (Rekomendasi Kebijakan)
1. Pengoperasian Sepeda Motor pada Jalan dengan Alinyemen Vertikal yang Melebihi Standar untuk Mendukung Keselamatan Berkendara 2. Kapal Ro-Ro untuk Perintis Laut 3. Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Maritim Autonomous Surface Ships (MASS) 4. Pengoperasian Balon Udara Berpenumpang untuk Tujuan Wisata 5. Potensi Sarana Kapal untuk Angkutan Barang Berbahaya di Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheuni 6. Kesiapan Sarana dan Navigasi Penerbangan serta Tanggung Jawab Asuransi dalam Pengoperasian PUTA untuk Komersial Penumpang dan Barang di Indonesia (Isu Strategis) 7. Potensi Seawig Sebagai Sarana Transportasi Wisata Perairan di Wilayah Kepulauan (Isu Strategis 8. Penerapan Standar UN ECE Pada Bus (NSPK)) 9. Penggunaan Sarana Teknologi Pada Kendaraan Bermotor sebagai Alat Deteksi Dini Kesesuaian Muatan NSPK 10. Skema Pengadaan dan Pengelolaan Sarana Kereta Api yang Berkelanjutan 11. Review Regulasi terkait Pelanggaran Pengoperasian PUTA di Bawah 25Kg di Indonesia (Quick Win dan Isu Strategi 12. Perencanaan Monorel Gantung di Indonesias) 13. Potensi Seaplane sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN	1. Layanan Water Taxi di Indonesia 2. Kebijakan Mendukung Penguatan Ekosistem Industri Maritim 3. Evaluasi Kebijakan Mendukung Percepatan Ekosistem Mobil Listrik 4. Evaluasi Kebijakan Transisi Energi Sektor Transportasi Bidang Pelayarank 5. Cyber Security di Dunia Penerbangan 6. Pengoperasian ROLA (Rolling Road/Rollende Lanstrabe) Untuk Angkutan Barang di Bidang Kereta Api 7. Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran 2025 (1446 H) 8. Kebijakan Peninjauan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri 9. Evaluasi Penyelenggaraan General Sales Agent (GSA) di Indonesia	

REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG PRASARANA DAN INTEGRASI MODA TRANSPORTASI TAHUN 2024-2026



2024 (14 Rekomendasi Kebijakan)	2025 (10 Rekomendasi Kebijakan)	2026 (4 Rekomendasi Kebijakan)
1. Evaluasi Tipologi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. 2. Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN. 3. Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata. 4. Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia. 5. Pengoperasian Bandar Udara Perairan. 6. Review Kebijakan Penyelenggaraan Bandar Udara Perairan. 7. Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara. 8. Evaluasi Program Angkutan Udara Perintis di Wilayah Papua dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. 9. Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. 10. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai. 11. Penguatan Konektivitas Hinterland dan Pelabuhan Utama Indonesia Melalui Angkutan Kontainer. 12. Integrasi Moda pada Simpul Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Merak 13. Optimalisasi Konektivitas Tol Laut dengan Angkutan Penyeberangan 14. Integrasi BRT Balikpapan City Trans dengan Angkutan Perkotaan	1. Evaluasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Transportasi Dalam Peningkatan Pariwisata Nasional (Dukungan Pelayanan Angkutan Perintis di Kawasan Pariwisata). 2. Pengembangan Simpul Angkutan Umum Yang Terintegrasi Guna Mewujudkan Smart City. 3. Reviu Rencana Induk Pelabuhan Kwardang. 4. Skema Pembiayaan Pengoperasian Tol Laut Melalui Pendanaan Non APBN (New Concept Tol Laut). 5. Kebijakan Optimalisasi Layanan Bandar Udara di Indonesia. 6. Key Performance Indicator (KPI) Fasilitas Integrasi Moda Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi yang Terintegrasi bagi Penumpang. 7. Key Performance Indicator (KPI) Fasilitas Prasarana Integrasi Moda Guna Meningkatkan Kualitas Layanan yang Terintegrasi untuk Barang. 8. Analisis Kebijakan Observasi Tataan Transportasi Kawasan Aglomerasi Di Ibu Kota Nusantara. 9. Evaluasi kebijakan pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sektor transportasi. 10. Peningkatan Kompetensi Situational Awareness dan Decision Making bagi Personel Air Traffic Controller (ATC).	1. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi pada Angkutan Lebaran Tahun 2026 dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Angkutan Lebaran.

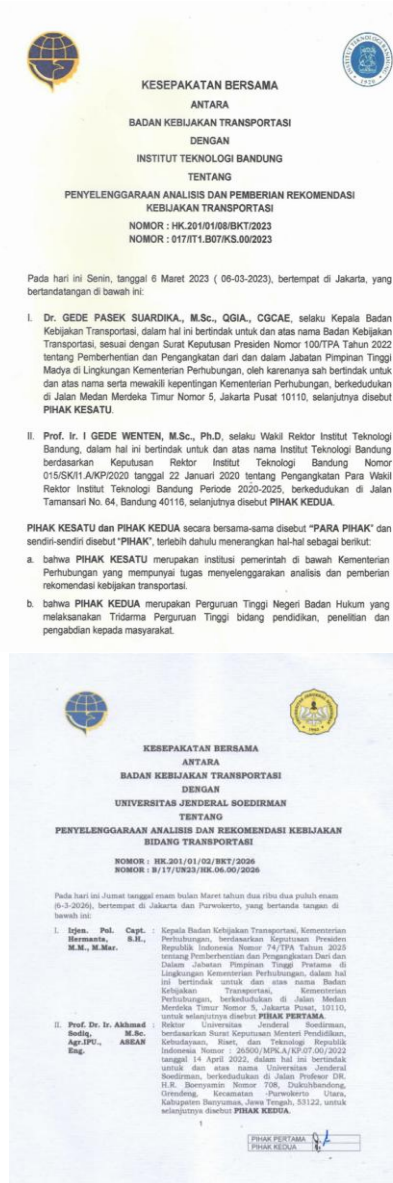
REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN TRANSPORTASI TAHUN 2024-2026

2024 (12 Rekomendasi Kebijakan)	2025 (13 Rekomendasi Kebijakan)	2026 (3 Rekomendasi Kebijakan)
1. Skema Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Transportasi di Wilayah Metropolitan dalam Menghadapi Tantangan Aglomerasi Kota 2. Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api 3. Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayaran 4. Kebijakan Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi 5. Perumusan Kebijakan Mobilitas Pergerakan Orang (Asal Tujuan Transportasi Nasional) 6. Perumusan Kebijakan Pengembangan Transportasi Last Mile dan First Mile dalam Mendukung Tol Laut dan Layanan Moda Utama dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Kerakyatan 7. Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) 8. Perumusan Kebijakan Pada Masa Angkutan Lebaran 2024 (Survei Potensi) 9. Perumusan Kebijakan Pergerakan Masyarakat pada Masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 (Survei Potensi) 10. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Trem Otonom di IKN 11. Perumusan Kebijakan Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Otonom di Indonesia 12. Perumusan Kebijakan Mengenai Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan dalam Rangka Menghadapi Nataru Angleb Tahun 2025 Pada Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni 13. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Slot Time Penerbangan di Indonesia 14. Kajian Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Transportasi Darat 15. Analisis dan Evaluasi Pola Pergerakan Masyarakat pada Angkutan Lebaran 2024 16. Analisis dan Evaluasi Pola Pergerakan Masyarakat pada Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024	1. Perumusan Kebijakan Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025 dan Nataru Tahun 2026 (Analisis Kebijakan Pengaruh WFA terhadap Mobilitas Pergerakan Orang pada Masa Lebaran 2025); 2. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pergerakan Mobilitas Orang Berbasis Mobile Positioning Data (MPD) pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025; 3. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pelayanan dan Tarif Ojek Online; 4. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Revisi UU LLAJ Penyelenggaraan LLAJ; 5. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Revisi UU LLAJ – PPNS; 6. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Revisi UU LLAJ Peran Swasta LLAJ; 7. Perumusan Kebijakan Pada Masa Angkutan Lebaran 2024; 8. Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayaran; 9. Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api; 10. Perumusan Kebijakan Pergerakan Masyarakat pada Masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025; 11. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Transportasi Otonom di Indonesia; 12. Perumusan Kebijakan Pengembangan Transportasi Last Mile dan First Mile Dalam Mendukung Tol Laut dan Layanan Moda Utama Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Kerakyatan; 13. Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).	1. Perumusan Kebijakan Pada Masa Angkutan Lebaran 2026 2. Analisa Kebijakan Jalan Dan Integrasi Moda Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Transportasi (MPD angleb & jalan tol) (isu strategis) 3. Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi Untuk Golongan Kendaraan Barang (isu strategis)

REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI TAHUN 2024-2026

2024 (19 Rekomendasi Kebijakan)	2025 (8 Rekomendasi Kebijakan)	2026 (1 Rekomendasi Kebijakan)
1. Analisis Pengaturan Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan Sate Safety Program (SSP) untuk Mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional 2. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum untuk Menurunkan Potensi Kecelakaan Jalan 3. Integrasi Data Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Mendukung Program RUNK 4. Pemutakhiran Data Perlintasan Sebidang di Indonesia 5. Pembatasan Usia Sarana Angkutan Umum dalam rangka Peningkatan Keselamatan Jalan 6. Risk Journey Management 7. Evaluasi Kebijakan Penanganan Masalah Over Dimension dan Over Load Pada Angkutan Jalan 8. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum 9. Fatigue Management pada Pilot 10. Analisa Risiko Pada Bangunan Jembatan dan Terowongan Pada Jalur Kereta Api 11. Evaluasi Sistem Pengawasan Sarana Perkeretaapian 12. Evaluasi Regulasi Perlintasan Sebidang (Reviu PM 94 tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan); 13. Mitigasi Pencegahan Penyebaran Virus Cacar Monyet (MPOX) pada Sektor Transportasi Udara 14. Evaluasi Pemenuhan Aspek Keselamatan Angkutan Sungai di Indonesia 15. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kereta Feeder KA Cepat menjadi KA Komuter Bandung 16. Rekomendasi Kebijakan terkait Pengawasan Operasional dan Penggunaan Armada Bus Pariwisata 17. Evaluasi Kebijakan Pengaturan Waktu Kerja dan Tempat Istirahat Pengemudi 18. Evaluasi Peraturan Terkait Penanganan Kondisi Darurat di Kapal 19. Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Suku Cadang Pesawat Udara Untuk Mempertahankan Tingkat Keselamatan Penerbangan	1. Evaluasi Implementasi Automatic Identification System (AIS) Untuk Meningkatkan Pengawasan Kapal Di Perairan Indonesia 2. Evaluasi Pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Non Konvensi 3. Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menjamin Keselamatan Berlalu Lintas 4. Analisis Kecepatan di Jalan Tol: Mengurangi "Gap Speed", Menekan Risiko Kecelakaan, dan Menjaga Kinerja Lalu Lintas 5. Analisis dan Evaluasi Pergerakan Penumpang Pada Masa Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru Tahun 2026 6. Persepsi Pengemudi Angkutan Barang Terhadap Penerapan Zero ODOL 7. Isu Strategis Survei Potensi Pergerakan Masyarakat pada Masa Lebaran Tahun 2025 (1446 H) 8. Analisis dan Evaluasi Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026	1. Analisa dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Pada Masa Libur Lebaran Tahun 2026/1447 H

CAPAIAN LAINNYA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif

Badan Kebijakan Transportasi juga memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 29 Tahun 2025



Sertifikat satuan kerja terbaik I (satu) nilai IKPA TA 2026

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi pada tanggal 24 Juni 2026 memperoleh Piagam penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik I (satu) Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Pagu di 50 s.d 150 Miliar Semester II Tahun 2026 Mitra KPPN Jakarta IV



19 MoU dengan Univeristas dan Lembaga

Badan Kebijakan Transportasi telah menjalin kerja sama dengan 16 universitas dan lembaga, antara lain ITB, Telkomsel, Kompas dll, dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan. Pada tahun 2026, BKT kembali melakukan penandatanganan 3 penandatngana kerja sama dengan Universitas Udayana, Universitas Jenderal Soedirman dan Univeristas Pertahanan, sehingga total MoU BKT menjadi 19 Kerjasama.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**



**BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI**

TERIMA KASIH